

ANALISA KEMACETAN PROGRAM BUMDES SUKA MAJU

Shanti Veronica br Siahaan

Program Studi Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana, Bengkayang,
Email: siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id

Benedhikta Kikky Vuspitasari

Program Studi Kewirausahaan, Institut Shanti Bhuana, Bengkayang,
Email: kikky@shantibhuana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah tentang percepatan kemandirian desa melalui pelaksanaan kegiatan program BUMDes yang tidak kunjung berjalan sejak tahun 2017 di desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kemacetan program BUMDes dan untuk memberikan masukan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan program BUMDes selanjutnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi dimana partisipan penelitian yaitu Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengurus inti BUMDes dipilih secara *purposeful sampling*. Pengujian kebenaran data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya kegiatan BUMDes yang telah dicanangkan sejak terbentuknya kepengurusan BUMDes di tahun 2017 disebabkan karena persoalan sumber daya manusia dimana belum memadainya kapasitas pemahaman dan pengetahuan tentang BUMDes yang dimiliki Kepala Desa dan pengurus BUMDes sehingga membuat program ini belum menjadi program prioritas bagi pemerintahan desa Suka Maju dan juga kurangnya komitmen untuk melaksanakan program BUMDes sehingga belum dapat menjadi penggerak perekonomian desa sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: bumdes, desa, dana desa, prioritas, komitmen.

Abstract

This research is motivated by a government program about accelerating village independence through the implementation of the BUMDes program activities that have not been running since 2017 in Suka Maju village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The purpose of this research is to find out the causes of bottlenecks in the BUMDes program and to provide input for the village government in carrying out the next BUMDes program. This research uses descriptive qualitative research techniques conducted by direct observation, in-depth interviews, and documentation in which the research participants, namely the Village Head, the Village Head Officer, and the core management of BUMDes were selected by purposeful sampling. Testing the correctness of the data using triangulation techniques. The results showed that the non-progress of BUMDes activities that had been launched since the formation of BUMDes management in 2017 was due to human resource issues where the inadequate capacity of understanding and knowledge about BUMDes owned by the Village Head and BUMDes administrators made this program not yet a priority program for the government. Suka Maju village and also a lack of commitment to implementing the BUMDes program so that it has not been able to drive the village economy as expected.

Keywords: bumdes, village, village funds, priorities, commitments.

PENDAHULUAN

Program percepatan kemandirian desa telah dirumuskan dalam nawa cita pemerintahan Jokowi-JK dalam periode pemerintahan 2014–2019 yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Bappenas, 2017). Program ini semakin diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menunjukkan perhatian utama pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian masyarakat desa (Palupi et al., 2018).

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan Permendes No.4, Tahun 2015, Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa disingkat BUMDes dengan modal yang berasal dari seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program kerja tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD untuk

setiap desa di seluruh Indonesia dimana salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pendirian dan pengembangan BUMDes (Ferosa & Hapsari, 2020).

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk dapat menjadi penggerak perekonomian desa yang mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menciptakan berbagai kegiatan ekonomi dengan mengelola berbagai potensi yang dimiliki oleh desa secara produktif. BUMDes yang mendapatkan modal usaha dari dana desa melalui kegiatan usaha yang dijalankannya diharapkan mendapatkan keuntungan untuk menjadi salah satu sumber bagi pendapatan desa sehingga desa dapat semakin mandiri dalam hal pendanaan pembangunan desa untuk dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan dari berbagai potensi desa dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Meskipun ketentuan pembentukan BUMDes berasal dari pemerintahan pusat, namun karena perlunya keterlibatan penuh masyarakat desa yang otonomi dalam menjalankan program ini, maka BUMDes haruslah terbentuk atas kemauan dan kesepakatan seluruh warga desa melalui perwakilannya yang hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan. (Berdesa, 2018).

BUMDes terus bertumbuh secara cepat, di tahun 2020 ini menurut Rudy Suryanto, pendiri Bumdes.id yang aktif memberikan training dan mentoring untuk pengelolaan BUMDes mengatakan bahwa telah ada sekitar 51.149 BUMDes terbentuk, sebanyak 39.634 BUMDes telah terdaftar, dan lebih dari 10,000 BUMDes tetap aktif berkegiatan di masa pandemi covid-19 ini. (Fisipol, 2020). Keberadaan Bumdes terus dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintah seperti turut menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi covid-19 melalui pengelolaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang diselenggarakan sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2020. (Lado, 2020). Peranan BUMDes untuk dapat menjadi penggerak perekonomian desa dan menciptakan lapangan pekerjaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dinantikan, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk dapat memahami dengan baik mengapa ada BUMDes yang dapat terus berjalan dan menghasilkan keuntungan, namun ada juga yang masih hanya sekedar nama di atas kertas sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menggerakkan kembali roda badan penggerak perekonomian desa tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian tentang keberhasilan pelaksanaan dan kendala dalam menjalankan BUMDes perlu dilakukan bercermin dari pengalaman kegagalan Koperasi Unit Desa

pada masa sebelum BUMDes dibentuk sehingga pendirian BUMDes tidak menyebabkan kerugian dana desa dan bisa memberikan manfaat dalam pembangunan desa. (Adhari & I, 2017). Penelitian tentang proses pengelolaan BUMDes di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menyimpulkan bahwa peranan masyarakat, Pemerintah Desa maupun pengelola BUMDes telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Desa Wisata Lerep telah berhasil mengukir prestasi dan menjadi salah satu tempat studi banding bagi pelaksanaan BUMDes meskipun masih menghadapi kendala yang perlu diatasi. (Ihsan, 2018). Sedangkan penelitian lain tentang kendala pengelolaan Bumdes di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang yang mengupas tentang keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan unit usaha yang menyebabkan BUMDes belum dapat mencapai tujuan pendirian BUMDes dan kurang optimalnya pengelolaan keuangan BUMDes. (Ferosa & Hapsari, 2020)

BUMDes Karaje Agi di desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang telah terbentuk dengan kepengurusan BUMDes yang dipilih dalam musyawarah desa di tahun 2017 masih berada dalam keadaan mati suri, belum ada kegiatan usaha BUMDes yang dijalankan saat penelitian dilakukan di bulan Februari - Agustus tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab kemacetan program BUMDes di desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dan untuk memberikan masukan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan program BUMDes selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti yang berperan serta dalam melakukan observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* dan melakukan analisa dokumen terkait dengan kegiatan BUMDes yang sudah ada. Wawancara terhadap Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan pengurus inti BUMDes dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka agar partisipan dapat memberikan jawaban secara terperinci mengenai apa yang ingin dikemukakan dan dapat menggambarkan pengalamannya secara jelas tanpa ada unsur rekayasa (Moustakas, 1994). Adapun wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung, lewat telepon dan percakapan lewat aplikasi *whatsapp*. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan simpulan. (Miles et al., 2014). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Penelitian ini dilakukan di desa Suka Maju,

Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa

Desa Suka Maju yang terletak di rute perjalanan antara kota Bengkayang dan kota Singkawang memiliki berbagai potensi desa yang bersumber dari potensi kekayaan alam dan potensi fasilitas desa yang telah dibangun, misalnya fasilitas air bersih yang berasal dari program pansimas. Potensi alam yang terkenal dimiliki desa ini diantaranya adalah jagung, padi, karet, buah jengkol dan buah kenari. Bahkan buah kenari telah menjadi incaran bagi para tengkulak yang akan menjualnya ke negeri jiran, Malaysia. Penjualan langsung ke Malaysia dimungkinkan karena letak geografis Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan daerah Serawak, Malaysia Timur. Potensi lain yang ada di desa adalah pemanfaatan sumber air bersih program pansimas yang belum dikelola secara profesional dan wisata alam Gunung Vandering. Selain itu, desa ini juga memiliki kandungan emas yang ditambang tanpa izin.

Masyarakat desa Suka Maju sebagian besar adalah petani yang mengolah lahan pertanian atau kebun miliknya sendiri ataupun milik orang lain. Tanah yang subur memanjakan masyarakatnya sehingga masyarakat kurang mempunyai jiwa wirausaha, dan lebih menggantungkan diri pada hasil alam. Bahkan para tengkulak rela datang untuk memetik sendiri hasil panen buah kenari yang telah dibelinya dengan perhitungan sederhana dari harga buah dalam satu pohon.

Kendala : Kapasitas pemahaman dan pengetahuan tentang BUMDes belum memadai

Dalam upaya untuk menjalankan program percepatan kemandirian desa dari pemerintahan pusat maka Kepala Desa telah mengadakan kegiatan musyawarah desa untuk memilih pengurus BUMDes di tahun 2017. Pemilihan pengurus masih dalam dominasi Kepala Desa yang ingin memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya yang belum memiliki pekerjaan tetap namun ada motivasi yang baik untuk mau bekerja meskipun tingkat pendidikannya belum setara SMA. Peribahasa tak ada rotan akar pun jadi, mewarnai pemilihan pengurus BUMDes, sehingga dari ketiga pengurus inti, hanya satu orang yang tamatan SMK.

Dalam hal pemilihan usaha BUMDes yang akan dijalankan juga masih berpusat pada pemikiran dan keinginan Kepala Desa. Perbincangan dengan pengurus BUMDes tentang jenis usaha yang dipilih telah dilakukan, dan masukan dari Kepala Desa tentang kebutuhan untuk menjalankan usaha toko ATK (alat tulis kantor) yang menyediakan berbagai kebutuhan alat tulis kantor, fotokopi dan jasa pengetikan menjadi pilihan usaha

BUMDes yang akan dijalankan. Jasa fotokopi dirasakan diperlukan masyarakat karena selama ini untuk keperluan tersebut masyarakat perlu ke kota Bengkayang. Dalam perencanaan juga dikatakan bahwa BUMDes akan menjalin kerja sama dengan perkantoran dan sekolah-sekolah yang ada di desa dan kecamatan karena jaraknya yang cukup dekat sekitar 2 km ke ibukota kecamatan untuk menjadi langganan di toko ATK tersebut. Selain itu, sudah ada pemikiran untuk mengembangkan unit usaha BUMDes lainnya seperti kios pertanian dan pengelolaan air bersih pansimas.

Lama berselang sejak dikeluarkannya SK Kepala Desa tertanggal 12 Juni 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa yang memuat kepengurusan BUMDes ini, untuk pertama kalinya, proposal BUMDes tertanggal 28 Oktober 2019 diajukan ke pemerintahan desa untuk mendapatkan dana operasional di akhir tahun 2019. Pada saat pengajuan proposal ini bertepatan waktunya dengan masa pengunduran diri kepala desa dimana kepala desa untuk sementara waktu digantikan oleh PJ Kades atau Penjabat Kepala Desa sehubungan dengan keikutsertaannya dalam pemilihan Kepala Desa di tahun 2019 (Dominggus, 2019) dan terpilihnya kembali menjadi Kepala Desa Suka Maju periode 2020-2026. (Andreas, 2020).

Proposal BUMDes yang diajukan untuk memperoleh anggaran modal BUMDes sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam APB Des 2019, tidak diberikan oleh Penjabat Kepala Desa yang menjabat mulai bulan November 2019 sampai dengan Februari 2020 disebabkan alasan adanya kekuranglengkapan administrasi dan kurangnya komunikasi antara pengurus BUMDes dan Penjabat Kepala Desa. Anggaran BUMDes dalam APBDes tahun 2019 yang tidak disalurkan kemudian menjadi dana sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) di tahun 2020.

Meskipun Kepala Desa kembali terpilih untuk periode yang ketiga kalinya dan dana anggaran BUMDes juga tercantum dalam APB Des 2020, namun anggaran BUMDes tak kunjung diberikan kepada pengurus BUMDes alasannya karena Kepala Desa disibukkan dengan kegiatan satgas covid, penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat dan dana desa diprioritaskan untuk penanganan covid sehingga semakin memperkuat alasan untuk tidak menyalurkan modal BUMDes di tahun 2020. Selain itu, ada permasalahan dengan mulai lunturnya kepercayaan Kepala Desa terhadap kepengurusan BUMDes sehingga ada pemikiran dari Kepala Desa untuk mengganti kepengurusan BUMDes yang dinilainya kurang insiatif.

Meninjau kembali pelaksanaan program BUMDes yang telah dicanangkan sejak tahun 2017 namun hingga tahun 2020 belum berjalan disebabkan kapasitas pemahaman dan pengetahuan tentang BUMDes program

BUMDes yang belum memadai sehingga membuat program ini belum menjadi program prioritas bagi pemerintahan desa Suka Maju. Pelaksanaan program ini dapat ditunda-tunda dan anggaran dana desa untuk kegiatan BUMDes hanya sebatas rencana anggaran yang tidak disalurkan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prioritas pemerintah yang telah menjadikan anggaran BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa. (Kemendesa, 2020).

Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Bumdes Desa Sungonlegowo, daerah Bungah Gresik yang memilih usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan alat transportasi yang murah terjangkau sesuai kondisi masyarakat sekitar yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Keberadaan BUMDes ini telah menyentuh dan membantu kebutuhan dasar masyarakat serta dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bisnis yang dapat disumbangkan ke kas desa dan untuk pengembangan bisnis selanjutnya. (Mahmudah, 2018). Pemilihan usaha desa melalui studi kelayakan usaha yang tepat dan menjawab kebutuhan masyarakat akan membawa hasil yang lebih baik dan membawa semangat kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Kendala : Kurangnya komitmen

Pelaksanaan perencanaan program BUMDes Karaje Agi memerlukan komitmen yang kuat terutama dari pihak pemerintahan desa dalam hal ini adalah Kepala Desa selaku penanggung jawab program desa dan juga para pengurus BUMDes yang telah dipilih. Semua pihak yang paling terlibat ini harus memiliki kemauan yang kuat untuk dapat melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Adanya sikap saling menunggu dan kurang proaktif satu sama lain menimbulkan keraguan dan melemahnya kepercayaan antar pihak terkait.

Dalam pembentukan suatu hal yang baru perlu daya dorong yang kuat. Motivasi yang baik yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak perlu arahan dan bimbingan yang intensif. Motivasi yang baik perlu didukung oleh tahapan perencanaan yang jelas, terarah dan terpadu serta pembinaan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pelatihan menjadi sangat diperlukan terutama di tahap-tahap awal setelah pembentukan karena di saat awal itu dapat menjadi suatu momentum yang kuat untuk membawa serta motivasi yang baik yang dimiliki oleh pihak terkait dalam pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni untuk segera bergerak memulai usaha yang telah disepakati bersama tersebut. Terlebih lagi dalam kondisi pengurus BUMDes yang dipilih tidak semuanya memenuhi persyaratan minimum pendidikan SMA sederajat dan belum memiliki pengalaman menjadi wirausaha tentunya memerlukan bimbingan dan pendampingan yang lebih baik lagi dan efektif.

Perlu adanya evaluasi di tiap tahapan untuk dapat segera mengetahui kendala apa saja yang sedang dihadapi sehingga dapat dilakukan tindakan agar tidak mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Salah satu kendala yang dirasakan oleh para pengurus BUMDes adalah belum adanya pembinaan dan pelatihan pengurus BUMDes oleh para pihak terkait sebagaimana yang pernah direncanakan di awal pembentukan.

Pelaksanaan program BUMDes merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa menggunakan konsep pola pengembangan SDM yang konsisten sampai pada pencapaian tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. (Suhardi, 2015). Oleh karena itu, terutama pada tahap awal implementasi program BUMDes dimana para pengurus diketahui belum memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup sebagai pengampu kepercayaan mengelola usaha desa, perlu adanya usaha yang konsisten dari pihak pemerintahan desa dan dapat dibantu oleh pemerintahan daerah untuk memberikan pendampingan sampai batas dimana pengurus telah dapat mandiri menjalankan dan mengembangkan BUMDes. Pelaksanaan pendampingan ini perlu dilakukan dengan komitmen yang tinggi dalam semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya tentang perlunya pendidikan dan pelatihan bagi para pengurus BUMDes untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun bisnis yang dijalankan tersebut. Adapun bahan training yang perlu diberikan mencakup pemahaman tentang potensi diri dalam bidang kewirausahaan, membangun komitmen, potensi desa dan jenis usaha desa, peluang dan risiko bisnis serta aspek kelayakan dan perencanaan BUMDes. Materi training tersebut disarankan diberikan oleh pemberi materi sesuai dengan kebutuhan di desa dan di kantor BUMDes tersebut. (Hidayati et al., 2018).

Hasil penelitian yang menemukan bahwa permasalahan sumber daya manusia yang menjadi sumber utama penyebab kemacetan program BUMDes Karaje Agi, Desa Suka Maju ini juga mendukung penelitian sebelumnya di desa Suka Maju yang mengangkat tentang ketidakefektifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia desa Suka Maju yang terefleksikan pada kurangnya pemahaman tugas, rendahnya motivasi dan tingkat pendidikan yang masih rendah. (Rusmin, 2018). Permasalahan minimnya sumber daya manusia di desa ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik lagi agar perencanaan desa dapat berjalan dan memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Institut Shanti Bhuana yang telah memberikan dana penelitian internal bagi pelaksanaan penelitian dan juga kepada semua partisipan penelitian khususnya Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan pengurus inti BUMDes yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semua informasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan program pemerintah tentang percepatan kemandirian desa lewat kegiatan BUMDes memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang BUMDes yang memadai dan juga komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat didalamnya terutama Kepala Desa dan pengurus atau pengelola BUMDes. Program BUMDes haruslah menjadi prioritas bagi pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat agar dapat menggerakkan perekonomian desa dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan terus mengembangkan usaha yang berasal dari potensi desa dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mendapat dukungan dari masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia di desa Suka Maju memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik lagi agar motivasi yang baik yang telah dimiliki warga desa yang mau bekerja di BUMDes dapat digerakkan secara tepat dan efektif guna terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu kerjasama berbagai pihak terkait terutama pihak pemerintah daerah untuk pendampingan desa yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>

Andreas, R. (2020). *Pjs. Bupati Bengkayang Lantik 50 Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkayang Periode 2020-2026*. Beritatrends.Com. <https://beritatrends.com/2020/02/19/pjs-bupati-bengkayang-lantik-50-kepala-desa-se-kabupaten-bengkayang-periode-2020-2026/>

Bappenas. (2017). *Menuju Perencana Profesional SIMPUL Perencana: Nawa cita*. 29(April), 1–86.

Berdesa. (2018). *Informasi Lengkap Tentang BUMDes Yang Harus Anda Ketahui*. Berdesa.Com. [\[bumdes-yang-harus-anda-ketahui/\]\(#\)](https://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-</p></div><div data-bbox=)

Dominggus, C. (2019). *Daftar Nama Kades Terpilih Kabupaten Bengkayang*. Mengenalbengkayang.Com. <https://www.mengenalbengkayang.com/2020/03/kepala-desa-terpilih-bengkayang-2019.html>

Ferosa, M. I., & Hapsari, N. A. S. (2020). Analisis Kendala Pengelolaan Bumdes Desa Kopeng Kabupaten Semarang. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 236–254.

Fisipol. (2020). *Seeing the Potential of BUMDes in a Crisis Period*. Fisipol.Ugm.Ac.Id. <https://fisipol.ugm.ac.id/en/seeing-the-potential-of-bumdes-in-a-crisis-period/>

Hidayati, U., Djatmika, E. T., Witjaksono, M., Wahyono, H., Malang, U. N., & Malang, U. N. (2018). Analysis of Education and Training Needs To Increase BUMDes Management Capacity in Developing Business Units. *International Journal of Research & Review*, 5(September), 148–153.

Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>

Kemendesa. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dengan*.

Lado, L. R. (2020). *BUMDes bisa Kelola PKTD untuk Usaha Ekonomi Produktif*. Ekorant.Com. <https://ekorant.com/2020/08/06/bumdes-bisa-kelola-pktd-untuk-usaha-ekonomi-produktif/>

Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus : Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur*, 2(1), 52–56.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. SAGE Publication, Inc.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*.

Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y. S., & Fauzi, S. Al. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak. In *Lakpesdam PBNU*.

Rusmin. (2018). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Suka Maju, Kecamatan Betung, Kabupaten Bengkayang. *Ilmu Administrasi Publik*, 7(September), 1–12.

Suhardi. (2015). Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Nusantara*, 02(April), 73–83.